

Peran Penting Dan Implementasi Empat Pilar Negara Pancasila Dalam Pembangunan Indonesia

by Wiryadi Wiryadi

Submission date: 07-May-2024 09:26AM (UTC-0500)

Submission ID: 2373322565

File name: MANDUB_-_VOLUME._2,_NO._2,_JUNI_2024_Hal_212-222.pdf (530.06K)

Word count: 3609

Character count: 23910

Peran Penting Dan Implementasi Empat Pilar Negara Pancasila Dalam Pembangunan Indonesia

Wiryadi¹, Arkaan Fadhlurrahman², Muhammad Alif Atasyah³,
Muhammad Ardan Aldika⁴

¹⁻⁴ Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Korespondensi penulis : wyadis14@gmail.com¹, Arkaan@gmail.com², alif55@gmail.com³,
ardaan@gmail.com⁴

Abstract. *In people's lives as Indonesian citizens, there are 4 pillars of the Pancasila State which are very important in the ideology and development of the country, which consist of Pancasila as the state ideology, the 1945 Constitution, the Republic of Indonesia in the form of the Republic of Indonesia which has the sovereignty of the people, Bhinneka Tunggal Ika as the state motto, and mutual cooperation as the spirit of cooperation in society, is a strong foundation for the development of the Indonesian nation. In the context of development, the 4 Pillars of the Pancasila State provide clear direction and guidance for the government and society to achieve sustainable and inclusive development goals. By strengthening the values of Pancasila, respecting diversity, and implementing mutual cooperation in various areas of development, Indonesia can achieve sustainable progress and realize prosperity for all its people. challenges and opportunities in implementing the 4 Pillars of the Pancasila State in the context of Indonesian development, as well as providing recommendations to increase the effectiveness of this implementation. By contributing to understanding the importance of the 4 Pillars of the Pancasila State in guiding Indonesia's development towards a better future.*

Keyword: *The Important Role, Implementation Of The Four Pillars Of The State, Indonesia's Development*

Abstrak. Dalam berkehidupan masyarakat sebagai warga negara Indonesia Ada 4 Pilar Negara Pancasila yang sangat penting dalam ideologi dan pembangunan negara, yang terdiri dari Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI yang berbentuk Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan gotong royong sebagai jiwa kerja sama dalam masyarakat, merupakan landasan yang kuat bagi pembangunan bangsa Indonesia. Dalam konteks pembangunan, 4 Pilar Negara Pancasila memberikan arah dan panduan yang jelas bagi pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila, menghormati keberagaman, serta menerapkan gotong royong dalam berbagai bidang pembangunan, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. tantangan dan peluang dalam implementasi 4 Pilar Negara Pancasila dalam konteks pembangunan Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi tersebut. Dengan memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya 4 Pilar Negara Pancasila dalam memandu pembangunan Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Kata Kunci: Peran Penting, Implementasi Empat pilar negara, Pembangunan Indonesia

PENDAHULUAN.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, adalah negara besar yang didukung oleh sejumlah keunggulan, mulai dari keunggulan geografis (Sumber Kekayaan Alam), keunggulan demografis (Sumber Daya Manusia), keunggulan sosial budaya sampai dengan keunggulan ideologis. kemajemukan sosial budaya yang dikristalisasikan dalam bentuk nilai

Received April 03, 2024; Accepted Mei 07, 2024; Published Juni 30, 2024

* Wiryadi, wyadis14@gmail.com

⁶ filsafat hidup bangsa (filsafat Pancasila) adalah merupakan jati diri nasional, jiwa bangsa, asas kerokhaniaan negara dan sumber cita nasional sekaligus identitas dan integritas nasional, serta diikat dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika dan rasa cinta tanah air bangsa dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia dilandasi oleh nilai ideologi Pancasila, yang juga memiliki nilai keunggulan. (Noor Syam, 2008:3). Rumusan sila - sila Pancasila tersebut dituangkan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Gerakan reformasi yang digulirkan dan ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto (21 Mei 1998), ⁷ pada hakikatnya merupakan tuntutan untuk melaksanakan demokratisasi disegala bidang dengan cara menegakkan hukum dan keadilan, menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), melaksanakan Otonomi Daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menata kembali peran dan kedudukan TNI dan POLRI. Hilangnya orientasi masyarakat dan bangsa Indonesia berdampak tumbuh subur nya seks bebas, korupsi, konflik horisontal, primordialisme, aksi teror, dan memunculkan gerakan separatisme dan lain -lain. gerakan reformasi akan berhasil, apabila masyarakat memiliki pemahaman terhadap etika dan budaya politik. berdasarkan Pancasila untuk membangun budaya politik yang demokratis yang menjadi tuntutan reformasi. Sebab pertumbuhan dan perkembangan demokrasi pada suatu bangsa sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan dan perkembangan etika dan budaya sosial politik dari bangsa yang bersangkutan. Semakin dewasa etika dan budaya sosial politik suatu bangsa, maka demokrasi yang dibangun juga makin beretika dan memiliki korelasi positif dengan pencapaian ² tujuan pemerintahan demokrasi, yaitu kesejahteraan sosial bagi rakyat secara keseluruhan. Budaya politik yang sesuai dengan prinsip -prinsip demokrasi adalah budaya politik yang termanifestasi melalui pemahaman warganya melalui orientasi, pandangan, dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Oleh karena itu, budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis, dan budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Apakah peran penting implementasi empat pilar dalam pembangunan indonesia

Bagaimana peran penting implementasi empat pilar dalam pembangunan indonesia?

PEMBAHASAN

PENGERTIAN EMPAT PILAR NEGARA

adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh maka bangunan akan mudah roboh. Baca juga: Menerjang Berbagai Tantangan Bangsa Melalui Empat Pilar MPR RI Empat pilar disebut juga fondasi atau dasar yang menentukan kokohnya bangunan. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai - nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat. Dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat. Konsep Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terdiri dari:

Pancasila

UUD 1945

Bhinneka Tunggal

NKRI

Empat Pilar Buah Perjuangan Reformasi Mahasiswa Empat pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kedudukannya berada di atas tiga pilar yang lain. Empat pilar tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa empat pilar tersebut adalah prinsip moral keIndonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

PANCASILA

Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dalam pembangunan mulai di bahas ketika Badan Penyelidik Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melaksanakan sidangpertama. Sidang BPUPKI dilaksanakan 2 (dua) kali, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan tanggal 16 Juli 1945. Pada sidang pertama itulah, dibahas tentang dasar negara apa nanti yang digunakan apabila Indonesia merdeka. Hal ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan

olehketua sidang Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodi - ningrat. Ketua BPUPKI melontarkan pertanyaan pertama dan utama yang harus di jawab oleh para anggota BPUPKI, yaitu tentang apa dasar Negara Indonesia apabila merdeka dikelak kemudian hari. Para anggota tersebut bekerja keras untuk menjawab pertanyaan itu, hingga akhirnya salah seorang anggota BPUPKI Soekarno mengemukakan dan menjelaskan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 (lima) sila, dan pada saat itu pula Soekarno memperkenalkan 5 (lima) dasar negara bagi Indonesia merdeka dengan nama Pancasila. Pancasila adalah falsafah (pandangan hidup), yang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat. Tatkala unsur-unsur masyarakat yang direpresentasikan oleh para anggota BPUPKI (kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/PPKI) itu memutuskan untuk membentuk diri sebagai bangsa, maka nilai-nilai luhur masyarakat itu diangkat dan diabstraksikan menjadi pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, setelah bangsa Indonesia bersepakat membentuk

Negara Indonesia, maka pandangan hidup bangsa itupun diangkat dan diabstraksikan lagi menjadi pandangan hidup negara. Nilai - nilai yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa, dan pandangan hidup negara itu telah mengalami Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan negara. Pancasila dalam hal ini tidak hanya sebagai suatu pemikiran dan dasar negara, melainkan berlanjut dalam bentuk gagasan bertindak yang kita sebut ideologi. Ideologi ini tidak saja berkaitan dengan kehidupan kenegaraan, melainkan juga kehidupan masyarakat. Dengan demikian ideologi ini merupakan ideologi negara dan bangsa Indonesia, jadi merupakan ideologi nasional. Berdasarkan analisis demikian dapatlah dikatakan bahwa ideologi nasional merupakan keseluruhan ide atau gagasan yang bersumber dan berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran (filsafat bangsa: Pancasila) yang termaktup di dalam Pembukaan dan Pasal- Pasal UUD 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional untuk pelaksanaan guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Pancasila diangkat sebagai pilar bangsa Indonesia karena dianggap sesuai dengan kondisi negara- bangsa Indonesia yang pluralistik dan cukup luas dan besar. Dibutuhkan dasar pemikiran yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan agar dapat diterima oleh seluruh warga bangsa, inilah mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diangkat sebagai pilar negara -bangsa Indonesia karena: Sesuai dengan kondisi negara-bangsa yang pluralistik dan besar seperti Indonesia Mampu mengakomodasi keanekaragaman yang ada di negara-bangsa Indonesia Memiliki konsep, prinsip, dan nilai yang merupakan kristalisasi dari sistem keyakinan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, yang menjamin kokohnya Pancasila sebagai pilar

dalam kehidupan ¹⁸berbangsa dan bernegara.

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan landasan utama dan dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa hukum harus dijunjung tinggi dan diterapkan. Setiap kegiatan di negara ini harus berdasarkan hukum dan setiap warga negara harus taat pada hukum. Negara yang tidak mampu menegakkan hukum akan menyebabkan situasi yang disebut anarki, dimana warga negara bertindak tanpa kendali dan mengutuk hak asasi, yang menyebabkan kekacauan.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 .

⁵Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD1945. ¹⁹Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan untuk yaitu

Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik

Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, diperlukan tubuh-tubuh yang kuat akan jiwa pemerintahan dapat menjadi sehat untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi memajukan bangsa.

Mencerdaskan bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasan pada tingkatan tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Membangun Kesejahteraan Rakyat

salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan rakyat. masyarakat di Indonesia yang perlu diperhatikan salah satunya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya.

Percepatan Dan Pembangunan Dibergai Sektor

Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang begitu banyak, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang. Seperti melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di pulau Jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia timur seperti Papua.

BHINEKA TUNGGAL IKA

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikaruniai keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang luar biasa. Keberagaman ini sering digambarkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini bukan sekadar motto, tetapi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional.

Mendorong Toleransi Dan Kerukunan

semboyan ¹⁶ **Bhinneka Tunggal Ika** mengingatkan kita untuk saling menghormati perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Toleransi dan kerukunan antarumat beragama dan kelompok sosial menjadi landasan penting untuk membangun bangsa yang harmonis dan stabil.

Memperkaya Budaya Dan Inovasi

keberagaman budaya di Indonesia merupakan sumber kekayaan dan inspirasi yang tak ternilai. Bhinneka Tunggal Ika mendorong pertukaran budaya dan kolaborasi antar kelompok, menghasilkan inovasi dan kreativitas yang memajukan bangsa.

Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan

semboyan ini menjadi pengingat ¹⁶ bahwa meskipun berbeda - beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Rasa persatuan dan kesatuan ini menjadi kekuatan pendorong untuk bersama - sama membangun bangsa yang maju dan sejahtera.

Memperkuat Ketahanan Nasional

bhinneka Tunggal Ika memperkuat ketahanan nasional dengan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Semangat ini mendorong rakyat untuk bersatu padu dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan bangsa.

contoh Penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam Pembangunan Nasional:

Program pemerintah yang mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Festival budaya yang menampilkan berbagai kesenian dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan gotong royong dan bakti sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang. Pendidikan multikultural yang menanamkan nilai - nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan

Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi merupakan filosofi yang menjadi landasan pembangunan nasional Dengan memahami dan mengamalkan nilai - nilainya, kita dapat mewujudkan Indonesia yang maju, damai, dan sejahtera.

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara Indonesia yang mengacu pada Undang - Undang Dasar 1945 pasal 1. NKRI memiliki beberapa komponen penting yaitu pertama Kesatuan: Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti bahwa kekuasaan politik dan administratif berada di tangan pemerintah pusat di tingkat nasional. Walau terdapat tingkat otonomi yang berbeda di berbagai daerah, wilayah wilayah tersebut masih berada dalam kerangka negara kesatuan. Kedua, Republik yaitu bahwa Indonesia dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara dipilih oleh rakyat dan tidak berhubungan dengan sistem monarki. Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan di Indonesia. Ketiga, Keanekaragaman: Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan geografis yang sangat besar. Konsep Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tapi tetap satu", mencerminkan semangat persatuan di tengah keragaman ini dengan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. NKRI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan mendeklarasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. NKRI memiliki bentuk pemerintahan republik dan sistem politik demokrasi. Sebagai sebuah negara kesatuan, NKRI memiliki ciri khas dalam struktur pemerintahannya. Berbeda dengan negara federal yang memiliki pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang lebih besar, negara kesatuan memiliki pemerintahan pusat yang memiliki

wewenang utama dalam mengatur negara dan wilayah - wilayahnya. NKRI terdiri dari 38 provinsi yang terbagi lagi menjadi kabupaten/kota. Tiap provinsi memiliki pemerintah provinsi yang berwenang mengatur wilayahnya sesuai dengan undang- undang yang berlaku. Namun, pemerintahan provinsi ini tetap di bawah koordinasi pemerintah pusat yang memiliki wewenang lebih luas dalam bidang-bidang tertentu seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan ekonomi nasional. Sistem pemerintahan dan administrasi NKRI didasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berisi semangat “Berbeda- beda tetapi tetap satu”. Ini mengacu pada keberagaman etnis, budaya, agama, dan bahasa di Indonesia yang diakui dalam kerangka kesatuan nasional. Dalam konstitusi NKRI, Pancasila adalah dasar filsafat negara yang mengartikulasikan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi panduan dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia. Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang mengatur dasar- dasar negara, lembaga-lembaga pemerintahan, hak asasi manusia, dan sistem hukum di negara ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak adat, suku, keyakinan, dan budaya. Prinsip dan semangat Bhineka Tunggal Ika adalah satu -satunya cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara membantu menjaga keutuhan dan keamanan, memperkuat jati diri bangsa, menjamin kemajuan dalam segala bidang, dan menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Dalam mempertahankan ¹⁷ Negara Kesatuan Republik Indonesia, cinta tanah air adalah salah satu dari banyak sikap yang dapat diambil . Berbakti kepada negara dan bersedia mengorbankan sesuatu untuk melindunginya. Selain itu, juga dengan mempertahankan kelestarian lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, mempertahankan kerukunan antarumat, dan rela berkorban dengan senang hati, tulus, dan tidak mengharapkan imbalan. Sangat penting untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.. Memiliki sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan berarti membantu semua orang tanpa memandang agama, suku, ras, atau antar golongan; mengikuti kegiatan di komunitas dan sekolah; serta tidak memaksakan keinginan kepada orang lain. Dengan demikian akan tercipta suasana aman dan tentram di dalam masyarakat dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Dalam proses pembentukan karakter bangsa, diperlukan komitmen yang kuat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karakter yang dibentuk pada individu dan bangsa Indonesia harus karakter yang memperkuat dan memperteguh komitmen terhadap NKRI, bukan karakter yang berkembang secara tidak

terkendali yang bisa merusak NKRI. Oleh karena itu, cinta terhadap tanah air harus dikembangkan dalam pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa harus melalui pengembangan sikap demokratis dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pembentukan karakter bangsa harus dalam konteks menghormati persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI.

PERAN 4 PILAR KEBANGSAAN BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA

Masyarakat harus diajarkan dan diyakinkan secara terus-menerus agar mereka dapat menyadari bahwa tindakan kekerasan, konflik bersenjata, kerusuhan dan perpecahan tidak akan menguntungkan siapapun tanpa harus dipaksakan. Keinginan masyarakat untuk hidup sejahtera, adil, dan makmur akan terwujud jika diterapkan dengan pemahaman dan implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam “empat pilar” kehidupan berbangsa dan bernegara. “Empat pilar” yang menjadi dasar dalam membangun bangsa Indonesia saat ini dan masa depan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat hal tersebut adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Empat hal yang fundamental tersebutlah yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi dari nilai-nilai “empat pilar” kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Tugas untuk memasyarakatkan “empat pilar” kehidupan berbangsa dan bernegara bukanlah hal yang sederhana, tetapi membutuhkan dukungan dan teladan dari berbagai komponen bangsa, terutama dari para penyelenggara negara. Oleh karena itu, berbagai wacana baik dari unsur pemerintah maupun organisasi politik dan masyarakat mulai mengungkap bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat kesepakatan yang disebut sebagai “empat pilar” kehidupan berbangsa dan bernegara.

SOSIALISASI 4 PILAR KEBANGSAAN

Dasar pelaksanaan sosialisasi empat pilar kebangsaan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasal 15 ayat 1. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa salah satu tugas MPR

adalah mengkoordinasikan anggotanya untuk memasyarakatkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dianggap penting karena

MPR menilai bahwa masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa gerakan nasional pemasyarakatan dan pembudayaan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, eksistensi dan perannya dari waktu ke waktu akan memudar. Ini kemudian akan mempengaruhi penyelenggaraan negara.

TUJUAN EMPAT PILAR NEGARA

Pemilihan nilai-nilai empat pilar adalah untuk mengingatkan kembali kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan. Dengan tetap mengacu kepada tujuan negara yang dicita-citakan, serta bersatu padu mengisi pembangunan agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera.

KESIMPULAN

Pilar kebangsaan dan bernegara dianggap sebagai dasar untuk mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia. Hal ini termasuk Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika. Sosialisasi tentang nilai - nilai yang terkandung dalam “empat pilar” ini dianggap penting untuk menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi dari nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, tugas memasyarakatkan “empat pilar” kehidupan berbangsa dan bernegara adalah tanggung jawab kita bersama dan membutuhkan dukungan dan teladan dari berbagai komponen bangsa, terutama dari para penyelenggara negara.

10

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya, saya dapat menyelesaikan karya artikel ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah kewarganegaraan dan saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Aqib, Zaenal. 2009. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya.

Asshiddiqie. Jimly, 2020, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Dasim, Budimansyah. (2019). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa .
- Dewantara, Hadjar. (2022). Bagian pertama : Pendidikan. Yogyakarta : Pertjetakan Taman Siswa
- Dimiyati & Mudjiyono. (2021). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Husein, Ahmad dkk. Jurnal Model Pendidikan Karakter Bangsa, Universitas Negeri Jakarta dan Kementerian Pendidikan
- Kansil, C. S.T. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, (Jakarta: PT Pradnya Pramita, 2020.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, NSPK (Nilai, Standar, Prosedur dan Kriteria) Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Nonformal, Dirjen PAUD Press
- Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Agustus 2019, Jakarta.
- Nasional, 2020.
- Permasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Pusat Pengkajian MPR RI, 2021, Jakarta
- Pndidikan 8, 206 ,1 -17,2021.
- Wreksosuhardjo, S. (2019). Filsafat Pancasila secara ilmiah dan aplikatif. Yogyakarta: Andi.
- Zainudin Hasan, Nengah Nyapur, Nilai Sosial Pergaulan (2).
- Zainudin Hasan, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Perundang-undangan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah
- Zainudin Hasan, Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pembangunan Yang Berkelanjutan, Jurnal Ilmiah Advokasi 11(1), 128-140 2023 .
- Zainudin Hasan, Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Hukum Di Indonesia, Jurnal Mahasiswa 2 (1), 44- 45, 2024

Peran Penting Dan Implementasi Empat Pilar Negara Pancasila Dalam Pembangunan Indonesia

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	batamtoday.com Internet Source	2%
2	3lib.net Internet Source	1%
3	hastaksara.blogspot.com Internet Source	1%
4	www.cakranews.id Internet Source	1%
5	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
6	likhitapradnya.wisnuwardhana.ac.id Internet Source	1%
7	bulanksatria.wordpress.com Internet Source	1%
8	www.harianbhirawa.co.id Internet Source	1%
9	fajar-al.blogspot.com Internet Source	1%

10	jurnal.ucy.ac.id Internet Source	1 %
11	kuasakata.com Internet Source	1 %
12	slideplayer.info Internet Source	1 %
13	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
14	stt-pln.e-journal.id Internet Source	1 %
15	journal.staiypiqaubau.ac.id Internet Source	1 %
16	geograf.id Internet Source	1 %
17	saifulafandiww.blogspot.com Internet Source	1 %
18	venindaap.blogspot.com Internet Source	1 %
19	ereport.ipb.ac.id Internet Source	1 %
20	kholil.staff.uns.ac.id Internet Source	1 %
21	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On